
**PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DALAM MEWUJUDKAN KOTA
PARIWISATA BERTARAF INTERNASIONAL: STUDI KASUS DI
KABUPATEN BANYUWANGI JAWA TIMUR**

Bayu Mitra Adhyatma Kusuma

(Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: bayumitraa.kusuma@yahoo.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi yang diterapkan pemerintah daerah guna melaksanakan pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional, pembangunan terintegrasi dilakukan melalui tiga langkah konsolidasi utama. Hal tersebut antara lain peningkatan infrastruktur untuk akses menuju wisata unggulan, konsolidasi kekayaan budaya lokal, dan konsolidasi komunitas pariwisata. Melalui langkah-langkah tersebut, angka kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun serta Banyuwangi mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi dan kontribusinya di sektor pariwisata.

Kata Kunci: pembangunan terintegrasi, pembangunan pariwisata, kota pariwisata internasional

***DEVELOPMENT OF TOURISM POTENTIAL IN REALIZING THE
PREDICATE AS AN INTERNATIONAL TOURISM CITY CASE OF
BANYUWANGI REGENCY, EAST JAVA***

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe how the integrated development in realizing Banyuwangi as an international tourism city is. The type of research used in this study is a qualitative with analysis descriptive approach. The results

of study show that in realizing Banyuwangi as an international tourism city through integrated development, the lokal government of Banyuwangi Regency performs three steps of consolidation, namely improvement of infrastructure for access to the leading tourist destinations, consolidation of lokal cultural wealth, and consolidation of the tourism community. Through such measures, the number of foreign tourist arrivals has increased very significantly from year to year and Banyuwangi received several awards for the accomplishments and contributions in the tourism sector.

Keywords: integrated development, tourism development, international tourism city

PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004. Mengacu pada undang-undang tersebut maka dapat diambil benangmerah bahwa desentralisasi harus mencakup dua hal pokok: pertama, pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bukan hanya pembagian kewenangan seperti yang ada dalam UU No. 5 Tahun 1974. Kedua, memberikan tanggungjawab kepada daerah untuk mengelola potensinya. Hal ini dapat diartikan bahwa jika suatu daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelola potensinya maka pada saat itu juga daerah tersebut juga mendapat tanggungjawab untuk mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi tersebut. Dengan adanya otonomi daerah, pembangunan diharapkan akan lebih efektif, efisien, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Widmalm (2008: 47) bahwa dari sisi ekonomi, otonomi daerah menghasilkan lahirnya pemerintahan yang efisien, efektif, anti-korupsi dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Saat ini daerah dipandang sebagai motor penggerak untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia sehingga daerah dipandang sangat penting bagi masa depan Indonesia secara keseluruhan. Daerah memainkan peran penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Untuk itu, pembangunan terintegrasi semakin dibutuhkan saat ini karena kompleksitas isu, masalah, dan sumber daya. Pembangunan terintegrasi akan mengatasi masalah ini dengan menyediakan solusi yang komprehensif dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional.

Dalam rangka mencapai predikat sebagai kota pariwisata internasional, Kabupaten Banyuwangi harus melaksanakan pembangunan terintegrasi. Karena berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional” ayat (2) menyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan negara. Ayat (3) juga menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan bagian integral dari prosedur perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan laporan tahunan yang dilakukan oleh unsur-unsur negara dan masyarakat di tingkat nasional dan lokal. Pembangunan terintegrasi memerlukan perencanaan dan manajemen untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam suatu entitas. Jika tidak, maka situasi tersebut akan membawa berbagai masalah dalam pemerintahan Banyuwangi. Setiap lembaga memiliki program masing-masing yang mereka jalankan. Pembangunan terintegrasi terdiri dari sistem yang saling berhubungan untuk mencapai perbaikan meliputi ekonomi, fisik, sosial dan lingkungan daerah. Kunci untuk seluruh proses pembangunan terintegrasi adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah harus dipertimbangkan dalam rangka memelihara hubungan satu sama lain. Sinergi antara unsur-unsur harus berjalan sedemikian rupa sehingga efek dari pembangunan terintegrasi akan lebih terasa daripada setiap *stakeholder* berjalan sendiri-sendiri.

Saat ini pariwisata menjadi sektor yang sangat menarik dan menjanjikan untuk dikembangkan. *The World Tourism Organization* memperkirakan bahwa pariwisata menyumbang hingga 10% dari produk domestik bruto global, sehingga pariwisata menjadi industri terbesar di dunia. Potensi pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar dan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan (*International Tourism Partnership*, 2004: 3). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pariwisata dapat memberikan kontribusi untuk pengentasan kemiskinan bagi negara-negara berkembang. Pariwisata merupakan salah satu jalan yang layak diutamakan untuk pembangunan ekonomi lokal dewasa ini, termasuk di Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah dengan wilayah terbesar di Provinsi Jawa Timur yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah Banyuwangi membentang dari dataran tinggi ke dataran rendah dengan kekayaan dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Banyuwangi memiliki daya tarik di sektor pariwisata yang sangat beragam. Terdapat pemandangan alam seperti pantai, gunung, hutan, taman nasional dan lainnya. Berdasarkan keragaman aset pariwisata yang lebih dominan pada wisata alam, maka pembangunan pariwisata yang diutamakan adalah *eco-tourism* atau dengan kata lain pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan dan budaya.

Melihat ilustrasi di atas, kita akan membayangkan bahwa keberadaan sumber daya alam yang kaya membuat pembangunan pariwisata menjadi mudah. Padahal sebenarnya tidak selalu demikian karena berbagai masalah dapat timbul. Permasalahan yang muncul antara lain adalah promosi yang tidak serius,

transportasi yang sulit, akomodasi yang kurang memadai, dan kurangnya infrastruktur pendukung lainnya. Diakui oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Annas bahwa masalah utama dari pembangunan pariwisata di Banyuwangi adalah kendala infrastruktur (www.travel.kompas.com).

Uraian di atas membuktikan bahwa sangat penting untuk menginvestigasi strategi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi untuk menjadikan Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional? Sedangkan, tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tentang strategi yang diterapkan pemerintah daerah guna melaksanakan pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional.

LANDASAN TEORETIS

Pembangunan Terintegrasi

Langkah awal memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pembangunan terintegrasi adalah harus memahami tentang arti dari pembangunan itu sendiri. Menurut Todaro dan Smith (1985: 21), istilah pembangunan diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang terus menerus pada masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Sementara Peet dan Hartwick (2009: 1) mendefinisikan pembangunan sebagai sesuatu yang membuat kehidupan menjadi lebih baik bagi semua orang. Pembangunan adalah peningkatan yang kompleks mencakup ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dari pernyataan Peet dan Hartwick tersebut dapat ditarik benangmerah bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang terintegrasi. Pembangunan terintegrasi dalam studi ini dapat diartikan sebagai proses yang saling terhubung dalam perencanaan program dari berbagai sektor dengan memastikan partisipasi semua *stakeholder* terkait, yang kemudian dituangkan dalam dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah* (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015. Hal ini diperkuat pernyataan dari Patel et al. (2004: 4), yang menunjukkan bahwa pembangunan terintegrasi adalah suatu proses ketika pemerintah daerah telah menyiapkan rencana pembangunan strategis untuk jangka waktu lima tahun.

Pembangunan Pariwisata

Dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015, menyebutkan bahwa salah satu isu strategis yang dihadapi selama lima tahun ke depan adalah pariwisata. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar di

sektor pariwisata. Pariwisata dapat diartikan sebagai tindakan wisata untuk tujuan rekreasi dan bisnis, dan penyediaan layanan untuk tindakan tersebut (UNWTO, 1993 dalam Williams dan Lew, 2014). Sedangkan UU No. 10 Tahun 2009 mendefinisikan pariwisata sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Meskipun pada dasarnya pariwisata berkaitan erat dengan bisnis, namun pembangunan pariwisata di Banyuwangi tidak hanya ditujukan untuk urusan bisnis. Tidak pula hanya diartikan dengan membawa wisatawan untuk urusan ekonomi. Melainkan juga untuk memacu pembangunan di berbagai sektor lainnya. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dilakukan untuk mendorong peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dengan memerhatikan kepentingan dari masyarakat luas. Seperti yang dikemukakan Spillane (1994: 14) bahwa pembangunan pariwisata akan terkait dengan aspek sosial budaya, politik dan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya sangat dibutuhkan pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Kabupaten Banyuwangi menjadi kota pariwisata internasional.

Kota Pariwisata Internasional

Bila mengacu pada beberapa definisi pariwisata yang telah disebutkan di atas, maka kita dapat menggambarkan bahwa kota pariwisata internasional adalah kota yang menyediakan layanan untuk tujuan rekreasi dan bisnis dengan standar internasional, bagi para wisatawan yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga mancanegara. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dinyatakan pula bahwa adanya kegiatan pariwisata membuat aktivitas pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di daerah tujuan wisata menjadi lebih sibuk. Pemerintah melalui kewenangannya membuat perencanaan dari pembangunan pariwisata serta menyediakan infrastruktur yang memadai. Swasta berperan dalam menyediakan akomodasi. Sementara masyarakat setempat juga mendapatkan kesempatan usaha dan bekerja dengan berbagai cara mulai menjadi *Tour Guide* sampai menyediakan barang-barang cinderamata. Berhasil atau tidaknya suatu tempat berkembang menjadi daerah tujuan wisata menurut Samsuridjal (1997: 21) sangat tergantung kepada tiga faktor utama, yaitu: atraksi, aksesibilitas dan fasilitas. Ketiga hal itulah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang untuk mewujudkannya dilakukan pembangunan terintegrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu yang terjadi dan berlangsung pada saat penelitian

dilakukan. Alasan peneliti untuk menggunakan penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah agar hasil dari penelitian dapat dideskripsikan dan digambarkan dalam kalimat yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena. Moleong (2000: 6) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi pendekatan ini diarahkan pada latar belakang obyek secara keseluruhan. Paradigma kualitatif disebut pendekatan konstruktivis atau naturalistik, pendekatan interpretatif atau *postpositivist* atau perspektif post-modern (Creswell, 1998: 4). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen terkait. Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan yang mewakili setiap *stakeholder*, yaitu berasal dari pemerintah daerah atau instansi terkait, swasta dan masyarakat yang berkecimpung dalam kepariwisataan di Banyuwangi.

Menentukan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam proses penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah proses pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Kabupaten Banyuwangi sebagai kota wisata internasional yang meliputi pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya dan tingkat kesiapan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan pariwisata. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti menggambarkan karakteristik dari obyek yang akan diperiksa dengan tujuan mendapatkan hasil yang faktual dan sistematis, sehingga membuat lebih mudah dipahami dan disimpulkan oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu sektor jasa yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan produk domestik bruto (PDB) adalah sektor pariwisata. Hal tersebut selaras dengan tema pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi yang sejak 2009 adalah pembangunan sektor pariwisata untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Tema itu mengacu pada *Pembangunan Daerah Tematik Banyuwangi* tahun 2009 yang telah dituangkan dalam RPJMD, yang memprioritaskan sektor pariwisata sebagai *leading sector*. Alasan utama pemilihan tema pariwisata di tahun 2009 dikarenakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penanganan pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan secara mendasar telah terstruktur sejak 2006 sampai 2008. Setelah kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka upaya strategis berikutnya dalam pembangunan daerah adalah aktualisasi diri.

Pembangunan pariwisata merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk aktualisasi diri di panggung lokal, nasional dan internasional.

Pembangunan pariwisata tidak hanya diarahkan pada pembangunan dan pemasaran destinasi pariwisata, tetapi lebih dari itu, pembangunan pariwisata diarahkan untuk lebih menekankan pada aspek potensi biofisik, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi. Banyuwangi memiliki potensi wisata alam yang sangat besar. Potensi ini pada awalnya dapat berkembang jika dikaitkan dengan posisi strategis Banyuwangi sebagai pintu gerbang menuju ke Bali melalui perjalanan darat. Sebagaimana telah banyak diketahui bahwa pelabuhan Ketapang di Banyuwangi terhubung langsung dengan pelabuhan Gilimanuk di Bali. Perkembangan pada saat ini, potensi pariwisata di Banyuwangi telah mampu tampil di kancah nasional maupun internasional tanpa lagi dikaitkan dengan Bali. Di forum *24th Eastern Regional Organization for Planning and Housing (EAROPH) World Congress 2014*, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Annas, mengatakan bahwa ada lima hal utama yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan pariwisata di Banyuwangi. Kelima hal tersebut terdiri dari infrastruktur, budaya, lingkungan, humanisme dan perilaku. Jika potensi wisata yang ada di Banyuwangi bisa dikembangkan, maka industri lainnya juga akan semakin mudah untuk dikembangkan.

Banyuwangi memiliki potensi wisata sangat besar. Dengan ikon yang sejak dahulu menjadi unggulan adalah *The diamond triangle*, terdiri dari kawah Ijen, Pantai G-land dan Sukamade. Saat ini potensi wisata yang ditawarkan di Banyuwangi semakin besar dan beragam. Persebaran lokasi wisata di Banyuwangi adalah sebagai berikut.

Gambar 1.
Peta Wisata Banyuwangi



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi (2014)

Pembangunan pariwisata di Banyuwangi dilakukan secara terintegrasi. Pembangunan dilakukan dengan saling terhubung, saling memberi dampak positif dan berjalan beriringan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan tiga langkah konsolidasi utama, yaitu: pertama, perbaikan infrastruktur untuk akses ke tujuan wisata unggulan, kedua, konsolidasi kekayaan budaya lokal. Banyuwangi memiliki kebudayaan lokal dan potensi wisata alam sangat beragam yang dikemas semenarik mungkin untuk menarik wisatawan. Kombinasi modernitas dan lokalitas akan menjadi kekayaan budaya yang menarik bagi wisatawan, dan ketiga, konsolidasi komunitas pariwisata, termasuk dengan mempersiapkan pola perilaku masyarakat Banyuwangi kepada wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Masyarakat Banyuwangi dibiasakan untuk bersikap ramah kepada wisatawan. *Stakeholder* pariwisata di Banyuwangi harus kompak untuk tumbuh dan memberikan efek *multiplier* luas bagi kesejahteraan masyarakat. Karena sektor pariwisata memiliki sektor cabang yang bisa meningkatkan perekonomian lokal. Secara lebih detail, pembangunan terintegrasi di Banyuwangi untuk sektor pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infratraktur untuk Akses Menuju Wisata Unggulan

Poin konsolidasi pertama adalah perbaikan infrastruktur untuk akses ke tujuan wisata unggulan. Salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan obyek wisata adakah keterjangkauan obyek wisata. Kemudahan akses untuk mencapai lokasi obyek wisata tersebut diukur dari kelancaran transportasinya baik melalui darat, laut dan udara. Upaya perbaikan pada ketiga jenis transportasi tersebut harus dilakukan agar para wisatawan yang berkunjung tidak merasa kesulitan. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi benar-benar menyadari akan hal itu. Itulah sebabnya pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas jalan di wilayah Banyuwangi, menyediakan bus perintis untuk wisata tertentu yang jauh dan terpencil, mempertahankan operasional pelabuhan Ketapang dan tentu saja salah satu poin yang sangat signifikan adalah beroperasinya Bandara Blimbingsari, yang diikuti dengan jadwal penerbangan yang terus bertambah. Saat ini telah ada dua maskapai yang melayani penerbangan ke Banyuwangi dari Surabaya dan Denpasar atau sebaliknya, yaitu *Wings Air* dan *Garuda Indonesia Airlines*. Bahkan, sebelumnya ada tiga maskapai yang beroperasi sebelum *Merpati Nusantara Airlines* mengalami kebangkrutan dan menghentikan semua operasi mereka secara nasional. Jumlah penumpang di Bandara Blimbingsari juga terus meningkat. Menurut catatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, perkembangan penumpang pesawat di Bandara Blimbingsari Banyuwangi terus meningkat. Pada 2011 tercatat jumlah penumpang di bandara tersebut sebanyak 7.000 orang, lalu melonjak menjadi 24.000 orang pada 2012 dan meningkat lagi menjadi 44.000 orang pada tahun

2013 (www.travel.kompas.com). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bandara sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Banyuwangi dalam melakukan berbagai kegiatan seperti bisnis dan sebagainya. Untuk layanan bus perintis, saat ini melayani rute dari Terminal Bus Jajag menuju wilayah Kecamatan Pesanggaran, Pantai Pulau Merah dan wisata pantai lain di sekitarnya.

Untuk lebih memperlancar arus komunikasi dan informasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menyediakan fasilitas *wifi* (wireless fidelity) di 1.200 titik lokasi. Penempatan titik-titik *wifi* tersebut adalah di ruang terbuka hijau dan ruang publik lainnya. Pada aspek biofisik, pelaksanaan pembangunan diarahkan pada penataan struktur ruang yang merupakan gambaran wilayah sebagai keseluruhan sistem dan jaringan infrastruktur untuk mengintegrasikan layanan, meliputi penerapan sistem transportasi, energi dan listrik, telekomunikasi dan sumber daya air.

2. Konsolidasi Kekayaan Budaya Lokal

Pada poin konsolidasi kedua, untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengadakan berbagai acara dari yang bertaraf lokal sampai bertaraf internasional seperti *Festival Gandrung Sewu*, *Banyuwangi Ethno Carnival*, *Banyuwangi Batik Festival*, *Banyuwangi Art Week*, *International Tour de Banyuwangi Ijen*, *Banyuwangi Jazz Festival*, *Banyuwangi International Surfing Competition* dan *Banyuwangi International Adventure Trail*. Salah satu even yang paling istimewa adalah *Banyuwangi Ethno Carnival* (BEC). BEC adalah sebuah karnaval yang sangat unik, karena tema yang digunakan budaya lokal kontemporer dengan etnik tradisional. Tujuan utama dari diselenggarakannya BEC yang pada tahun 2014 ini memasuki perhelatan yang keempat adalah menjembatani antara modernitas dengan seni budaya lokal khas Banyuwangi yang dikemas dalam karnaval bertaraf internasional.

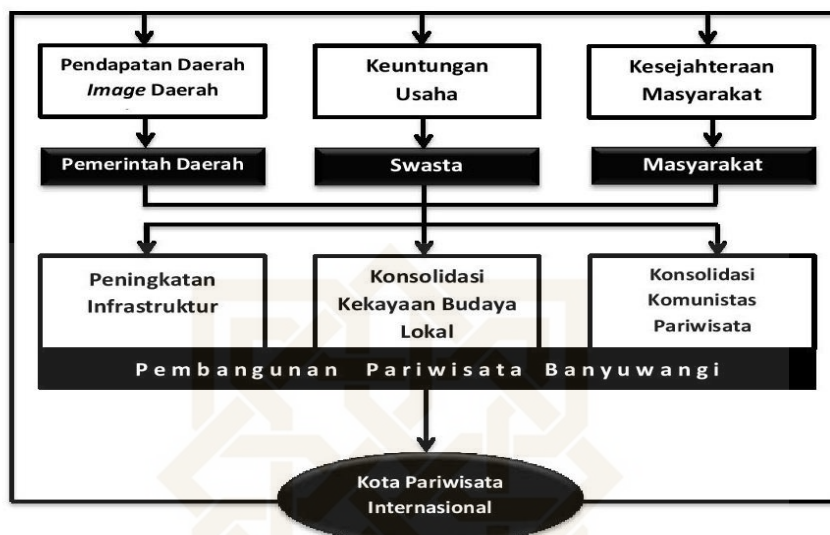
Begitu tinggi nilai komersial dan pembangunan seni serta wisata budaya yang didapatkan dari perhelatan BEC tersebut. Peserta BEC mengenakan kostum sesuai dengan tema yang selalu berubah setiap tahunnya. Hal ini mampu menstimulan ide dan kreativitas kostum dari masing-masing peserta untuk menunjukkan dan memberikan nuansa warna-warni yang menarik dengan desain yang sangat indah dan megah. BEC tidak hanya bergema secara lokal di Banyuwangi, tapi telah terdengar hingga luar daerah di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Karnaval BEC mengambil rute sepanjang jalan protokol di pusat keramaian Banyuwangi sehingga mampu menyedot antusiasme wisatawan domestik maupun mancanegara yang mengabadikan momen besar tersebut. Terbukti, adanya BEC telah mampu merangsang munculnya kegiatan ekonomi kreatif yang menghasilkan bagi masyarakat lokal.

3. Konsolidasi Komunitas Pariwisata

Pada poin konsolidasi ketiga, Masyarakat Banyuwangi dibiasakan untuk menjadi tuan rumah yang baik. Bahkan Bupati Banyuwangi mengintruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil Banyuwangi untuk selalu membawa tas plastik jika mengunjungi tempat wisata dengan maksud untuk membantu memungut sampah agar kebersihan tempat wisata tetap terjaga. Untuk mengonsolidasikan komunitas pariwisata di Banyuwangi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sepakat untuk membentuk sinergi guna mengembangkan sektor pariwisata lokal. Sinergi tersebut melibatkan Asosiasi Pemandu Indonesia, Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia, serta Asosiasi Kuliner, Kerajinan dan Batik Banyuwangi. Dalam sinergi tersebut ada delapan kode etik yang disetujui oleh subyek bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif di Banyuwangi. Kode etik itu antara lain, memberikan pelayanan maksimal kepada obyek dari pariwisata dan ekonomi kreatif, menyediakan informasi kepariwisataan yang benar dan akurat dan selalu menjaga citra dan reputasi pariwisata dan ekonomi kreatif dari Kabupaten Banyuwangi. Peran komunitas pariwisata menjadi sangat strategis, karena penyedia sarana pariwisata bukan hanya didominasi pemerintah, tetapi juga swasta. Sebagaimana dikemukakan oleh Karyono (1997:76) bahwa sarana pariwisata adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak bergantung pada kedatangan wisatawan. Komitmen pemangku kepentingan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memajukan industri pariwisata Banyuwangi perlu diapresiasi, karena tanggung jawab kemajuan pariwisata lokal tidak hanya di pemerintahan, tapi semua pemangku kepentingan.

Pembangunan pariwisata di Banyuwangi pada dasarnya telah berada di jalur yang benar. Namun untuk ke depan berbagai perbaikan dan peningkatan kualitas perlu terus ditingkatkan. Semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk terus meningkatkan citra Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional. Pemerintah, swasta dan masyarakat harus terlibat dalam peningkatan konsolidasi infrastruktur, konsolidasi kekayaan budaya lokal dan konsolidasi komunitas pariwisata. Secara lebih detail, pola hubungan yang berjalan dalam pembangunan pariwisata dalam mewujudkan Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional adalah sebagai berikut.

Gambar 2.
Alur Pembangunan Terintegrasi Sektor Pariwisata Banyuwangi



Sumber: Hasil analisis peneliti dari berbagai sumber (2014)

Dari skema gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses pembangunan pariwisata di Banyuwangi melibatkan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Seluruh *stakeholder* tersebut berperan dalam tiga langkah konsolidasi yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu konsolidasi infrastruktur, kekayaan budaya lokal dan komunitas pariwisata. Dari sinergi tersebut pembangunan pariwisata di Banyuwangi dapat berjalan dengan lebih maksimal sehingga saat ini Banyuwangi telah menjadi kota pariwisata bertaraf internasional. Bergeliatnya sektor pariwisata di Banyuwangi membawa dampak positif secara luas. Bagi pemerintah daerah, hal tersebut mampu meningkatkan pemasukan daerah secara signifikan. Selain itu *image* Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional membuat Banyuwangi semakin dikenal. Bagi swasta, perputaran transaksi pariwisata tentunya meningkatkan laba dari usaha mereka, sedangkan bagi masyarakat, pariwisata telah menciptakan banyak lapangan kerja baru dan peluang usaha sehingga pada akhirnya pariwisata dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari serangkaian upaya pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional sangat mengesankan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Banyuwangi meningkat secara signifikan. Pada tahun 2013, angka kunjungan wisatawan internasional mencapai 10.462 orang, meningkat 90% dibandingkan tahun 2012 yang hanya mencapai 5.502 orang (www.antarajatim.com). Sedangkan menurut Radar Banyuwangi, peningkatan jumlah turis adalah sebagai berikut.

Tabel 1.
Peningkatan Jumlah Wisatawan di Banyuwangi

Tahun	Lokal	Asing
2010	304.628	34.285
2011	401.988	42.938
2012	451.261	45.280
2013	498.304	50.244

Sumber: Radar Banyuwangi (2014)

Selain itu, Banyuwangi semakin disegani di tingkat nasional. Di tahun 2012 sektor pariwisata di Kabupaten dengan tajuk *The Sunrise of Java* ini mendapatkan penghargaan dari *Travel Tourism Club Award* (TCTA) 2012, sebagai kabupaten/kota yang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkualitas. Lebih tepatnya Banyuwangi memenangkan kategori *Most Improved* sebagai kabupaten/kota yang konsisten mengembangkan sektor pariwisata. Sementara pada tahun 2013 Banyuwangi juga kembali mendapatkan penghargaan dari TCTA untuk kategori *Most Creative* tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan terintegrasi telah mencapai hasil yang diharapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Implementasi otonomi daerah di Indonesia telah mendorong setiap daerah untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan potensinya masing-masing. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi yang terus memacu pembangunan pariwisata untuk mewujudkan kota pariwisata bertaraf internasional. Saat ini pariwisata menjadi sektor yang sangat menarik dan menjanjikan untuk dikembangkan. Namun upaya tersebut juga menemui berbagai kendala dan hambatan. Antara lain promosi yang tidak serius, transportasi yang sulit, akomodasi yang kurang memadai dan kurangnya infrastruktur pendukung lainnya. Dalam rangka mencapai predikat sebagai kota pariwisata internasional, Kabupaten Banyuwangi harus melaksanakan pembangunan terintegrasi. Pembangunan terintegrasi sangat diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam suatu entitas.

Membangun dan mengembangkan sektor pariwisata perlu dilakukan dengan bertahap dan dalam jangka waktu tertentu. Harus diakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir pembangunan sektor pariwisata di Banyuwangi telah menunjukkan prestasi yang menggemblirakan. Hal tersebut membuktikan bahwa pembangunan pariwisata di Banyuwangi sudah berada di jalur yang

benar. Pembangunan terintegrasi melalui tiga langkah konsolidasi meliputi konsolidasi infrastruktur, kekayaan budaya lokal dan komunitas pariwisata telah mampu menjadikan Banyuwangi sebagai kota pariwisata bertaraf internasional. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya angka kunjungan wisatawan mancanegara yang sangat signifikan dari tahun ke tahun serta Banyuwangi mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi dan kontribusinya di sektor pariwisata.

2. Saran

Meskipun pembangunan pariwisata di Banyuwangi telah menunjukkan perkembangan yang baik, namun upaya peningkatan harus selalu dilakukan. Adapun rekomendasi dari peneliti untuk terus meningkatkan upaya pembangunan terintegrasi dalam mewujudkan Banyuwangi sebagai kota pariwisata internasional adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur. Seperti jalan akses dari kawasan wisata yang satu ke daerah wisata yang lain. Hal ini diperlukan untuk memperlancar arus mobilisasi wisatawan;
- b. Menambah armada dan trayek bus perintis. Tidak hanya menuju kawasan Pesanggaran, tetapi juga menuju kawasan wisata lain untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama untuk kawasan *The Diamond Triangle*;
- c. Menjaga kualitas dan kuantitas even. Hal tersebut penting dilakukan demi memancing minat wisatawan untuk berkunjung ke Banyuwangi;
- d. Memberikan stimulan pada komunitas pariwisata. Memberikan stimulan penting dilakukan agar *stakeholder* pariwisata dapat lebih berkembang serta mempercepat perputaran arus uang di sektor pariwisata Banyuwangi;
- e. Meningkatkan promosi paket wisata di Banyuwangi melalui media yang lebih luas. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui media cetak dan elektronik serta bekerjasama dengan *travel agent*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashdiana, I. M. (2014). *Penerbangan ke Banyuwangi Tambah, Penumpang Naik*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2014 melalui www.travel.kompas.com.
- Creswell, J. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design*. New York: Sage Publications.
- International Tourism Partnership. (2004). *Tourism and Local Economic Development*. London: International Tourism Partnership.
- Karyono, A. H. (1997). *Kepariwisataan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
-

- Kusbiantoro, D. (2014). *Kunjungan Wisatawan di Banyuwangi Diprediksi Naik 75-100 Persen*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2014 melalui www.antarajatim.com.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patel, Y. et al. (2000). *IDP Guide Pack: General Overview*. Cape Town: Department of Provincial and Local Government.
- Peet, R. dan Hartwick, F. (2009). *Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives*. New York: The Guilford Press.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2010). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi 2010-2015*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Pertiwi, N. L. (2012). *Pariwisata Banyuwangi Terkendala di Infrastruktur*. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2014 melalui www.travel.kompas.com.
- Radar Banyuwangi. 27 November 2014. *Kunjungan turis asing meningkat*. Hlm. 29-39.
- Samsuridjal, D. (1997). *Peluang di Bidang Pariwisata*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Spillane, J. (1994). *Pariwisata Indonesia: Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Todaro, M. P dan Smith, S. C. (1985). *Economic Development in the Third World*. New York: McGraw Hill.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- United Nations World Tourism Organization. (1993). *National and Regional Tourism Planning*. London: Routledge.
- Widmalm, S. (2008). *Decentralization, Corruption, and Social Capital: From India to The West*. New Delhi: Sage Publication India.
- Williams, S. dan Lew, A. (2014). *Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience*. London: Routledge.
-